KEDUDUKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Muhammad Husni
IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang
Email: husninanag73@gmail.com

Abstract:

Testament grants are a problem that often arises in the community. Testamentary grants are seen as virtuous deeds for the culprit because on the one hand the grantee wants to get a reward that continues to flow for him, on the other hand grants are one form of good deeds that is helping people who are given grants. Because the grant is a free gift, the grant must fulfill the stipulated conditions both in Islamic law and civil law. Assets granted by may not exceed one third of the assets owned. This is so that the heirs do not feel harmed.

Grants are not allowed to be given to heirs unless there is approval from other heirs. Grants granted by the grantor to other people according to Islamic law are three opinions, which may be withdrawn, may not be withdrawn and may be withdrawn except to other people who are not close relatives. Whereas according to the Civil Law may withdraw the testamentary grant that has been given, because the will start from a party, if the party who testifies is withdrawing its intention, that is normal and permissible. withdrawal here is the same as aborting or canceling his good intentions. In other words, the will be given to someone else, but can be withdrawn.

Keywords: Grant, Testament and Withdrawal of Testament Grants

Abstrak

Hibah wasiat merupakan persoalan yang sering muncul di masyarakat. Hibah wasiat dipandang sebagai perbuatan kebajikan bagi pelakunya karena di satu sisi sipemberi hibah ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir bagi dirinya, disisi lain hibah merupakan salah satu bentuk amal perbuatan yang baik yaitu membantu orang yang diberi hibah. Karena hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma, maka hibah harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan baik secara hukum Islam maupun secara hukum perdata. Harta yang dihibahkan oleh tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dimiliki. Ini agar ahli waris tidak merasa dirugikan.

Hibah tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah kepada orang lain menurut hukum Islam terdapat tiga pendapat yaitu boleh ditarik kembali, tidak boleh ditarik kembali dan boleh ditarik kembali kecuali kepada orang lain yang bukan kerabat dekatnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata boleh menarik kembali hibah wasiat yang sudah dikrarkan, karena hibah wasiat itu bermula dari suatu pihak, jika pihak yang berhibah wasiat itu menarik kembali niatnya, itu hal yang wajar dan diperbolehkan. penarikan kembali disini sama dengan menggugurkan atau membatalkan niat

baiknya. Dengan kata lain hibah wasiat sudah diniatkan diberikan kepada orang lain, namun dapat ditarik kembali

Kata kunci : Hibah, Wasiat dan Penarikan Hibah Wasiat

A. Pendahuluan

Antara manusia dan harta dalam kehidupan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisah-pisahkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Manusia berusaha dengan segala daya upaya yang ada padanya untuk memperoleh sejumlah harta sehingga tidak jarang terjadi kasus kekerasan yang dapat merenggut jiwa.

Sejarah membuktikan bahwa jalan kekerasan itu cukup lama dilalui dalam kehidupan manusia, sehingga dapat masa di mana orang mengenal dan saling menghormati hak milik orang lain. Kesadaran itu menjadi lebih sempurna dengan datangnya agama Islam yang menghormati dan mengakui hak milik orang lain. Agama Islam tidak sekedar pengakuan saja, akan tetapi memberi petunjuk untuk memperoleh harta yang halal, tidak menghina dan merugikan orang lain, cara mengembangkan hak milik kepada orang lain. Salah satu cara pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dapat melalui hibah wasiat. Manusia dalam perjalanan hidup di dunia mengalami tiga peristiwa penting, waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru dalam keluarga, kemudian setelah dewasa ia akan menikah membangun keluarga dan menunaikan dharma baktinya yaitu berlangsungnya keterunan. Kemudian pada saat akan meninggal dunia, peristiwa ini peristiwa penting karena diliputi oleh suasana yang penuh rahasia yang sangat penting yang menimbulkan rasa duka dan sedih yang meliputi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, timbulah persoalan baru setelah orang tersebut meninggal dunia yaitu yang berkaitan dengan sesuatu yang ditinggalkan. Berhubungan dengan itu sangat diperlukan adanya peraturan yang menampung segala akibat meninggalkan seseorang. Pembicaraan para fuqaha mengenai hibah wasiat berdampingan dengan hukum kewarisan, karena kedua masalah itu bertemu pada suatu titik yaitu berpindahnya hak milik sesudah mati. Pemindahan hak milik seseorang sesudah mati ada dua bagian yaitu ; (1) sebagian Allah sendiri yang mengatur besar kecilnya bagian dari masing-masing ahli waris, (2) sebagian diberi wewenang kepada pemilik harta untuk menyerahkan hak miliknya kepada siapa yang dikehendakinya dengan jalan hibah wasiat yang dalam pelaksanaannya harus didahulukan wasiat dari pada pembagian warisan..

Dengan adanya dua sistem tersebut mengandung hikmah yang sangat besar, bahwa Tuhan yang Maha Bijaksana memperhatikan pihak pemilik harta dan pihak ahli warisnya sekaligus. Ia tidak berpihak kepada pemilik untuk melepaskan semua hartanya kepada orang-orang yang disukainya tanpa memperhatikan nasib ahli warisnya, sebagaimana tidak pula ditutup mati kesempatan untuk memanfaatkan sebagai miliknya pada bagian akhir hayatnya untuk menambah amal shalehnya. Tetapi dibukanya pintu untuk melaksanakan tujuan dan maksud yang suci itu yang belum sempat dikerjakan sebelumnya. Permasalahan akan muncul kepermukaan pada saat hibah wasiat yang sudah diwasiatkan ditarik kembali digugurkan hibah wasiat itu.

Wasiat. Hukum Islam tentang wasiat berdasarkan pada ketentuan dan As-Sunah yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian ahli mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi mati. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi

wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntunan Al Qur'an. Wasiat yang didasarkan pada atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah apabila syarat itu benar. Batasan syarat ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang berinya, atau orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syariat. Disyaratkan orang yang menerima wasiat yakni dia pukan ahli waris yang memberi wasiat; orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan; serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.¹

Menurut ulama Hanafiyah, wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah stelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik berupa barang maupun manfaat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, wasiat ialah sesuatu perikatan yang mengharuskan kepada sipenerima wasiat menghaki 1/3 harta peninggalan si pewasiat. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, wasiat ialah perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan sukarela terhadap sebagian hartanya untuk memberi hak memiliki kepada orang lain yang ditangguhkan sesudah yang bersangkutan mati.² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f memberi pengertian wasiat sebagai berikut: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi wasiat adalah suatu pemberian seseorang atau lembaga baik berupa barang atau benda, piutang atau manfaat yang dapat dimiliki oleh yang menerima wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia³ Selanjutnya, dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (pasal 195 ayat 3). Persetujuan ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris (pasal 195 ayat 4) Mengenai obyek wasiat, pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang dapat diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris (ayat 2). Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (pasal 3). Pasal 195 menyatakan bahwa wasiat hanya dari harta warisan diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga kecuali semua ahli waris menyetujui (ayat 2). Pernyataan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris (ayat 4)⁴ Malik An-Nakha'i dan Umar Bin Abdul Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan apakah sepertiga harta itu yakni kondisi pada saat mewasiatkan atau sesudah mati ialah sepertiga peninggalan diwaktu berwasiat. Sedang Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat lain yang lebih shahih dari kedua pendapat As-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah diwaktu ia mati⁵

Demi kepentingan yang berwasiat, yang melakukan wasiat, dan ahli waris wasiat mempunyai rukun dan syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan ada pihak yang diragukan, dan jangan ada silang sengketa dikemudian hari. Namun, apa yang dikhawatirkan itu tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal ini disebabkan adakalanya ang berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dan adakalanya yang menerima wasiat berani mengubah isi wasiat atau membuat palsu sama sekali, disamping tidak jarang pula pihak ahli waris yang tidak mau tahu dengan wasiat orang tuanya. Pada dasarnya, alokasi wasiat adalah diberikan kepada orang lain, bukan kepada

¹ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2010) hal 354

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1994) hal 50

³ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) hal 283

⁴ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penorma-an* hal 355

⁵ *Ibid*, hal 356

orang yang memiliki hubungan waris. Sebab tujuan wasiat adalah berbuat kebajikan menggunakan sebagian hartanya, dan ahli waris telah mendapatkan jatah dari hak warisnya. Karena itu menurut *qaul adhar* wasiat kepada sebagian ahli waris, sekalipun tidak melebihi 1/3 dari total kekayaan hukumnya tidak sah kecuali ahli waris yang lain memberikan persetujuan pasca kematian si pemberi wasiat⁶

Hibah. Hibah menurut KUH pasal 1666 Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁷ Menurut pengertian pasal 1666 KUH Perdata yang dinamakan hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan sesuatu benda kepada pihak yang lain, pihak yang menerima itu sebagai suatu perjanjian. Perjanjian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja. Perkataan pemberian dalam pasal 1666 KUH Perdata dipakai dalam pengertian sempit, karena hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan itu dinamakan pemberian. Menurut pasal 1667 KUH Perdata hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka hibahnya adalah batal⁸

Menurut KHI pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berbeda dengan wasiat, kalau wasiat seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain selagi si pemberi masih hidup, tetapi dimilikinya setelah sipemberi wasiat meninggal dunia. Sedang hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain dan dimiliki oleh penerima hibah sejak benda tersebut diterima, tidak menunggu si pemberi hibah meninggal dunia.⁹ Dalam hibah hak milik yang langsung dan sempurna atas benda sebenarnya dari suatu harta diserahkan kepada orang yang diberi, oleh sebab itu bilamana hibah sengaja dibubuhi syarat atau pembatasan tentang pemakaian ataupun penjualan harta tersebut, syarat-syarat dan pembatasan yang ditetapkan itu tidak sah dan hibah tersebut tetap sah.¹⁰

Ketentuan Hibah Dan Wasiat

1. Menurut Hukum Islam

Dasar hibah dapat dikaji dari Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 177 “*Dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdakakan hamba sahaya*”, dan hadis Nabi yang dijadikan rujukan hibah diantaranya : Dari Ibnu Abbas r.a beliau bersabda : Nabi Saw. bersabda “*orang yang menerima kembali pemberiannya (hibah) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya itu.*” Muttafaq ‘alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari : “*Tidak ada tamsil yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya*”. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. beliau bersabda : “*Tidak halal bagi seseorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali*

⁶ Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri, Lirboyo Press, 2013) hal 410

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya paramita, 1992) hal 217

⁸ *Ibid* hal 365

⁹ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi ...* hal 285

¹⁰ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan* hal 360

pemberiannya, selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arba’ah (perawi yang empat, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah) dan hadis tersebut dinilai shaheh oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.¹¹ Dalam hadis tersebut terkandung dalil pengharaman meminta kembali hibah. Menurut jumhur ulama Al Bukhari menetakannya sebagai bab kitabnya dengan judul : “ Bab tidak halal (haram) bagi seorang muslim meminta kembali hibah dan sedekahnya.” Jumhur ulama mengecualikan pembereian ayah kepada anak dan semacamnya.¹²

Dalam KHI pasal 212 dengan tegas menyatakan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik kembali. KHI membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin. Sedangkan kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibahnya.¹³ Untuk dapat dikatakan sah atau tidak suatu pemberian kepada orang lain, maka diperlukan adanya rukun dan syarat hibah yaitu : (1) Shighat hibah. Menurut Syekh Muhammad bin Qosim, tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.¹⁴ Hibah itu melalui ijab qabul, sebagaimana bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Menurut Imam Malik dan Imam As-Syafi’i, yang dipegang adalah qabul di dalam hibah. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa ijab itu saja sudah cukup, sedangkan orang-orang Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya.¹⁵ (2) Penghibah penghibah adalah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain. Dalam hal ini penghibah diperlukan syarat-syarat : (a) Memiliki apa yang dihibahkan, (b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, (c) Orang dewasa, (d) tidak dipaksa sebab hibah itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.¹⁶ Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁷ (3) Penerima hibah. Penerima adalah orang yang menerima pemberian. Untuk dianggap sah sebagai penerima, maka penerima hibah harus memenuhi syarat yaitu benar benar ada diwaktu diberi hibah, apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya misalnya janin, maka tidak sah.¹⁸ (4) Barang hibah. Barang hibah adalah sesuatu harta yang dihibahkan. Adapun syarat-syarat barang hibah yaitu : (a) Benar-benar ada, (b) Harta yang bernilai, (c) Dapat dimiliki dzatnya, (d) tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, (e) dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, Imam As-Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah¹⁹ Adapun ayat-ayat dan hadis Nabi saw. yang menerangkan dan

¹¹ As-Shan’ani, *Subulussalam*, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya, Al Ikhlas, 1995) hal 322

¹² *Ibid* hal 323

¹³ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi* hal 287-288

¹⁴ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bi Qosim As-Syafi’i, *Fathul Qorib*, (Surabaya, Al-Hidayah, ttg) hal 40

¹⁵ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Bandung, Al-Ma’arif, 1988) hal 167

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan* hal 359

¹⁸ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Hal 171

¹⁹ *Ibid* hal 172

menjadi dasar dari wasiat sangat banyak sekali, yang dari padanya dapat dipahami, bahwa wasiat merupakan kewajiban moral seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya karena orang itu telah berjasa atau membantu usaha dalam kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk keluarganya yang memperoleh sebagian harta waris.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dalil wasiat adalah surat Al-Baqarah ayat 180, "*diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa*" dan Surat Al Maidah ayat 106 "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa*". Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umarr r.a berkata, Rasulullah bersabda : *tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang atau diwasiatkan lalu tinggal samapai dua malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya*", (muttafaq alaih)

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat dipahami sebagai berikut : (1) Jika seseorang mempunyai harta dan merasa ada orang lain yang bukan ahli warisnya dalam harta itu lantaran jasa atau bantuan yang pernah diberikannya sepenuhnya sedang jalan lain tidak ada yang membalas budi baik itu maka wajib orang tua itu berwasiat, (2) Wasiat itu ada untuk kepentingan agama, kepentingan umum dan kepentingan perorangan, (3) Bagi setiap orang yang akan berwasiat hendaklah ia ingat kepentingan ahli warisnya, (4) Harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta, (5) Wasiat itu tentu berupa harta tetapi juga bisa berupa pembebasan hutang, (6) Wasiat baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, (7) Wasiat menjadi gugur bila penerima wasiat meninggal lebih dahulu, (8) Pada hakikatnya wasiat itu semacam akad, dengan demikian wasiat disaksikan oleh dua orang saksi.²⁰ Untuk dapat dikatakan sah atau tidak, maka wasiat itu harus memenuhi rukun (1) Sighat. Sighat wasiat bisa berupa perkataan ataupun isyarat, (2) Orang yang berwasiat. Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kecakapan yang sah. Keabsahan kecakapan ini didasarkan pada : akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. (3) orang yang menerima wasiat. (4) Yang diwasiatkan. Mengenai jenis yang diwasiatkan, fuqaha' sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya, atau dari manfaat barang yang akan diwasiatkan. Namun mereka berselisih tentang mewasiatkan manfaat (hak guna)²¹

2. Menurut Hukum Perdata

Ketentuan hibah wasiat menurut hukum perdata terdiri dari warga negara Indonesia, keturunan Arab, India, Pakistan dan timur asing, bukan tionghoa, adalah terkena titel 13 dari Burgerlijk Wetboek buku II tentang hibah wasiat yang berdasarkan Staatsblad 1924 No.556. sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, ditetapkan

²⁰ *Ibid* hal 225

²¹ *Ibid* hal 228

oleh undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal 913 sampai 929 BW. Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitieme portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. Menurut Asser mayers, dalam *legitieme portie* ini terdapat dua sistem yaitu : *pertama*, sistem Prancis dan Jerman pada zaman dahulu, dimana seperti hukum Islam yang melarang si peninggal warisan menetapkan hibah wasiat mengenai bagian tertentu yakni 4/5 bagian atas semua harta warisan. *Kedua*, sistem romawi yang menetapkan bagian seorang anak setidak-tidaknya harus diserahkan kepada seorang anak tersebut harta warisan ayahnya. Sistem kedua inilah yang dianut dalam *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda dan Indonesia.²² Pasal 913 BW berbunyi “*Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan. kepada waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terdapat bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.*”

Ditetapkan pula bahwa *legitieme portie* tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan maupun dengan wasiat. Menurut isinya, terdapat dua wasiat yaitu: (1) wasiat yang berisi pengangkatan waris. Dalam pasal 954 berbunyi “*wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengah orang-orang yang mendapat kekayaan menurut pasal 954 ini adalah waris dibawah titel umum.* (b) wasiat yang berisi hibah. Pasal 957 berbunyi: *hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, di mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti segala barang-barang yang bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana isi yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang : (a) beberapa barang tertentu, (b) barang-barang dari satu jenis tertentu, (c) hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan.*²³

Cara Penghibahan Wasiat

1. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak menentukan suatu cara tertentu untuk menciptakan keamauan terakhir dari si peninggal warisan. Menurut hukum Islam cara mewasiatkan harta harus ditetapkan dengan tegas dan terang, manakala yang berwasiat dapat berbiara. Namun jika yang berwasiat itu bisu, maka dapat dengan isyarat asalkan dimengerti maksudnya tersebut. Jika yang berwasiat dapat menulis, maka tulisan harus jelas dan terang serta mengandung maksud yang berwasiat.²⁴ Untuk menguatkan maksud baik dari yang berwasiat maka salah satu cara penghibahan wasiat menurut hukum Islam diperlukan adanya saksi yang dapat dipercaya dan dapat membenarkan adanya ucapan, isyarat, dan tulisan terakhir. Dalam Maidah ayat 106 dijelaskan “*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga*

²² *Ibid*

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* hal 210

²⁴ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Hal 173

yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”²⁵

2. hukum perdata

Hukum perdata mengenal tiga cara membuat hibah wasiat. Menurut Wiryono Projodikoro, BW mengenal tiga macam cara membuat hibah wasiat yaitu : (1) Testament Rahasia. Testament rahasia ini di atur dalam pasal 940 dan 941, dalam pasal ini ditentukan bahwa sipeninggal warisan harus menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis tentang niat baik kemauan terakhir itu. Tulisan itu harus ditandatangani oleh si pewaris tersebut. Tulisan tersebut tertutup dalam sampul, tersegel dan diserahkan ke notaries dan sisaksikan empat orang saksi. Kemudian si peninggal warisan membuat pernyataan yang isinya bahwa tulisan tersebut adalah wasiatnya.²⁶ (2) Testament tidak rahasia. Dalam pasal 938 BW berbunyi, “ tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaries dengan dihadiri dua orang saksi”²⁷ Menurut Wiryono Projodikoro, testament tidak rahasia ini sejak dahulu dinamakan dengan testamen lisan. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa tidak menganggap cara lisan sebagai syarat mutlak.²⁸ (3) Testamen ditulis sendiri. Testamen tertulis sendiri (olografis) diatur dalam pasal 932 *Burgerlijk Wetboek* berbunyi : suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaries. Notaries tersebut dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan yang mewasiatkan dan saksi-saksi, akta mana yang harus ditulis, baik dibawah surat wasiat, jika surat wasiat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun diatas kertas sendiri, jika surat wasiat itu tersegel disampaikan kepadanya : dalam hal terakhir ini dihadapan notaries dan saksi si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan kepada sampulnya yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiat cacatan mana harus dikuatkan dengan tanda tangannya. Dalam hal ini bila mana si si yang mewariskan karena suatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat atau sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul atau akta penyimpanan atau keduanya maka notaries tersebut harus membuat suatu keterangan tentang satu lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut.”²⁹

Pada saat penyerahan testament, testament harus sudah tertulis, tertutup dan tersegel disaksikan dua orang saksi di muka notaris dengan tujuan bahwa itu benar testamentnya. Pasal 934 BW, menyatakan bahwa sipeninggal waris dapat meminta kembali testamentnya. Untuk itu, notaries harus membuat pernyataan bahwa testamennya ditarik kembali dengan surat outentik.³⁰

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yaitu pengkajian dan penyelidikan literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan judul. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkaji dua peraturan yaitu hukum Islam dan KUH Perdata. Metode yang

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung Bale Bandung, 1986) hal 105

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 206

²⁸ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan* hal 107

²⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 204

³⁰ *Ibid*

digunakan adalah metode deduktif, induktif dan komperatif. Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum baik hukum Islam maupun KUH Perdata.

Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Menurut Hukum Islam

a. Wasiat.

Ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, apakah itu harus ditinggalkan atau harus dilakukan. Adapun pendapat itu :

Pertama, pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak atau sedikit. Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa wajibnya wasiat itu dari Umar, Thalhah bin Mutharrif, Zubair dan Asy-Sya'bi yang didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 180 "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*". "Al-Ma'ruf" adalah sesuatu yang tidak ditolak ahli waris karena jumlahnya yang sedikit bila dibandingkan dengan hartanya atau jangan sampai terlalu banyak sehingga akan menghabiskan bagian ahli waris.³¹ *Kedua*, pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya. Ini pendapat Amsruq, Ilyas. Qotadah, Ibnu Jabir dan Az-Zuhri. Para fuqaha sudah sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, apabila tidak diluluskan oleh ahli waris. Mereka memperselisihkan apabila diluluskan oleh ahli waris, maka menurut Jumhur fuqaha, diperbolehkan. Tetapi menurut Ad-Dhahiri dan Al-Muzani, tidak boleh. Pangkal perbedaan itu disebabkan dengan tidak jelasnya kata-kata Nabi : "*ada wasiat bagi ahli waris*". Fuqaha beralasan , bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh karena dipandang sebagai ibadah, meskipun dilaksanakan oleh ahli waris. Sedangkan fuqaha menyatakan dilarang karena mengingat ahli waris, maka ia membolehkannya apabila diluluskan oleh ahli waris³²

Ketiga, pendapat ini adalah pendapat empat orang Imam dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi. Tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan. Berdasarkan pendapat yang ketiga ini, maka wasiat itu kadang wajib, sunnah, haram, makruh dan boleh. Wajibnya wasiat itu dalam kondisi manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan apabila tidak berwasiat seperti adanya titipan, hutang, zakat yang harus ditunaikan atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya atau mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Wasiat itu disunnahkan bila diperuntukkan bagi kebaikan karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang shaleh. ³³ Wasiat itu diharamkan apabila merugikan ahli waris. Yang dimaksud wasiat yang merugikan ahli waris seperti ini adalah bathil, sekalipun wasiat

³¹ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Hal 221

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

itu mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja atau tempat hiburan. Menurut Jumhur ulama salaf dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Ahmad dan Imam yang empat kecuali Nasa’i dihasankan oleh Ahmad dan Tirmidzi)

Wasiat itu dimakruhkan, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Dimikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang fasik jika diketahui mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan dan kerusakan. Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang kaya, baik yang berwasiat itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat).³⁴ Fuqaha berbeda pendapat tentang memberikan wasiat kepada mayat (yakni apabila orang yang diberi wasiat meninggal dunia). Sebagian fuqaha mengatakan bahwa dengan meninggalnya orang yang diberi wasiat, maka wasiat menjadi batal, ini adalah pendapat jumhur fuqaha, sedangkan fuqaha yang lain berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal

b. Jenis harta yang diwasiatkan

Harta peninggalan yang akan diwariskan harus memenuhi syarat untuk diserahkan. Ini merupakan batasan undang-undang yang sangat penting, untuk menyakinkan dalam Agama Islam sejumlah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan bersisa, sesudah utang-utang dilunasi, sedangkan sisanya yang dua pertiga diperuntukkan bagi ahli waris. Mengenai jenis harta yang akan diwasiatkan, maka timbul perbedaan pendapat tentang masalah manakala seseorang menentukan jenis harta di dalam wasiat. Malik bin Anas berpendirian, bahwa para waris itu boleh memilih diantara dua jalan, yaitu menyerahkan jenis harta yang ditentukan si mati itu dengan suka rela, atau menyerahkan sepertiga saja dari seumlah harta peninggalan si mayit. Abu Hanifah, Muhammad bin Indrus Asy-Syafi’i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal dan Daud Al-Dhahiri menolak pendapat Malik bin Anas. Pokok pegenangan mereka, bahwa jumlah harta yang diwasiatkan atau telah jatuh menjadi milik pihak penerima wasiat pada saat orang yang Pokok pegenangan mereka, bahwa jumlah harta yang diwasiatkan atau telah jatuh menjadi milik pihak penerima wasiat pada saat orang yang berwasiat pada saat orang yang berwasiat itu mati, maka tidak mungkin memindahkan milik yang telah menjadi kepastian, tanpa kerelaan hatinya.³⁵

Pokok pegangan Malik bin Anas, bahwa dakwaan para waris itu besar. dalam hal ini tepat sekali pendapat yang dikemukakan oleh Abu Umar bin Abdil Bar yang mengatakan bahwa para waris mendakwakan begitu, maka mereka berkewajiban membuktikan dakwaan itu. Jikalau dakwaan itu ternyata benar maka pihak penerima wasiat itu cuma mendapatkan kadar dari sepertiga dari jumlah harta peninggalan. Jikalau ternyata harta wasiat itu cuma sepertiga, atau kurang, maka para ahli waris berkewajiban menyerahkan jenis-jenis harta yang sudah ditentukan itu dan jika perlu dengan paksa.³⁶

c. Menarik Kembali Hibah

Dalam hal penarikan kembali hibah wasiat, terdapat tiga pendapat yaitu: *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa orang tua berhak menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya berdasarkan hadis yang yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda :” *tidak halal bagi seorang mulim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Joesoef Soe’yb, Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam (Jakarta, Wijaya, 1983) hal 74

³⁶ *Ibid*

*pemberiannya, selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya” (H.R. At Thirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim). Kata “Halal” menunjukkan pengharaman terhadap perbuatan itu. Pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya sindirian tentang makruhnya adalah pengalihan dari pengertian tersurat dalam hadis tersebut. Hadis tersebut sebagai dalil bahwa sesungguhnya orang tua boleh mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya³⁷ **Kedua**, pendapat ini mengatakan bahwa seseorang tidak berhak menarik kembali harta yang telah dihibahkan, apapun alasan dari penghibahan tersebut. Pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak berhak menarik kembali harta yang diberikan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari “ Dari Ibnu Abbas r.a. berkata : Nabi saw bersabda ;”*Orang yang meminta kembali barang yang telah diberikan, sama dengan anjing yang muntah lalu ia makan kembali muntahan itu* “ (muttafaq alaih)³⁸*

Dalam hadis tersebut pada dhahirnya menunjukkan kepada keharaman menarik kembali harta yang telah diberikan dan disedekahkan kepada orang lain. Maka dapat dipahami bahwa menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada orang lain hukumnya haram karena diserupakan dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahan tersebut. **Ketiga**, pendapat ini mengatakan bahwa setiap orang berhak menarik kembali harta yang telah dihibahkan, kecuali yang dihibahkannya kepada keluarga dekat yang masih mahramnya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik : Berkata Umar Ibnu Khatabra “ *Barang siapa yang memberikan hibah untuk menyambung hubungan keluarga (silaturrahmi) atau karena memberi sedekah, maka ia tidak boleh menariknya kembali. Barang siapa memberikan hibah ia berpendirian, bahwa dengan hibahnya itu ia hanya menghendaki pahala, maka ia tetap atas barang hibahnya, di mana ia bisa menariknya kembali apabila ia tidak puas terhadapnya* “(HR. Malik)³⁹

Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hibah dan sedekah yang diberikan kepada keluarga dekat yang masih mahram tidak dapat ditarik kembali. Adapun selain keluarga dekat itu dapat ditarik kembali jika penghibah belum puas dan rela terhadap barang pemberiannya. Hibah itu mempunyai kekuatan hukum jika penerima hibah masih hidup. Jika salah satunya itu meninggal dunia tetapi sudah perjanjian akan diberi hibah, berdasarkan hadis tersebut di atas hibahnya batal. Adapun wasiat akan mengikat kepada penerima wasiat jika pewasiat meninggal dunia dan sudah dikurangi atau dilunasi hutang-hutang si pewasiat. Penarikan kembali hibah wasiat tidak akan mungkin manakala si pewasiat meninggal dunia, kemungkinan kecil itu terjadi pada ahli waris yang ditinggalkan, karena disebabkan ketidaktahuannya ketika orang tuanya berwasiat atau karena iri hati karena harta itu diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, penarikan kembali wasiat dalam Islam dilakukan oleh ahli waris, bukan si pewasiat. Jika si pewasiat masih hidup, maka sudah jelas dapat ditarik kembali, karena wasiat itu kemauan terakhir dari satu pihak. Pembatalan dapat dinyatakan dengan ucapan yang menyatakan pembatalan wasiat itu. Salah satu sebab ditariknya kembali wasiat itu disebabkan atas ketidakrelaan para ahli waris dalam ijin untuk persetujuan. Juga wasiat itu akan gugur atau batal, disebabkan hilangnya salah satu syarat-syarat yang ditentukan sehingga wasiat itu tidak mengikat, hal ini dapat dikatakan bahwa wasiat itu ditarik kembali.⁴⁰ Diantara syarat-syarat wasiat itu menjadi batal antara lain : (1) bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang sampai kepada

³⁷ As-Shan’ani, *Subulussalam*, hal 324

³⁸ Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Terj. Muh. Syarief Sukandy, (Bandung, Al-Ma’arif, 1983) hal 342

³⁹ Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi, *Al-Muwatha Malik*, (Bairut, Dar Fikr, 1974) hal 268

⁴⁰ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Hal 233

kematian, (2) bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu, (3) bila yang berwasiat itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.⁴¹

Dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam Indonesia disebutkan dalam ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi : (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum karena : (a) dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat, (c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk mencabut mengubah pewasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, (d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu : (1) tidak mengetahui adanya wasiat itu : (a) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, (b) mengetahui adanya wasiat tersebut, tidak ia menolak menerimanya, (c) mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum pewasiat. (3) Wasiat menjadi bata apabila barang yang diwasiatkan itu musnah.⁴² Wasiat merupakan lembaga dalam agama Islam yang dianjurkan pelaksanaannya kepada orang yang mempunyai kekayaan, khususnya ya,g mendekati kematian yang sifatnya sepihak, dengan demikian suatu saat dapat ditarik kembali oleh pewasiat manakala hidup, jika pewasiat meninggal dunia dan wasiat sudah diserahterimakan, maka tidak boleh ditarik kembali

Pasal 199 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.⁴³ Wasiat yang dianjurkan adalah kepada pihak keluarga yang tidak mendapatkan warisan dari pihak pewasiat, yang pelaksanaannya setelah kematian pewasiat, maka wasiat perlu dicatat dan disaksikan oleh orang lain, sehingga pelaksanaan wasiat itu sesuai dengan niatnya. Terjadinya penarikan kembali hibah wasiat itu dikarenakan tidak adanya musyawarah dalam keluarga tatkala akan berwasiat kepada orang lain, sedang keluarga sendiri tidak mampu.

Sedangkan penerusan, penguasaan maupun penunjukan harta peninggalan itu sebagai latihan bagi si anak atau keluarga dari pewasiat untuk dapat memanfaatkan dari sawah, kebun, atau harta kekayaan lainnya. Dalam kondisi demikian hendaklah takut kepada Allah jika anak keturunannya lemah. Oleh karena itu orang tua kalau ingin berwasiat hendaklah harus menengok kebelakang, dan yang utama adalah mendidik dan melatih sejak dini, agar nanti tidak lemah serta terlantar bila ditinggalkannya. Untuk menghindari kericuhan yang mungkin timbul dikemudian hari, maka si pewasiat hendaknya harus mengetahui batasan wasiat dan ketentuan yang bernilai kebaikan. Dalam pelaksanaannya hibah dapat disraahkan secara langsung pada waktu penghibah masih hidup atau dapat pula setelah kematian si penghibah, dan ini disebut dengan hibah wasiat.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, tt) hal 6

⁴³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* Hal 9

2. Menurut Hukum Perdata

Mengenai penarikan kembali hibah wasiat menurut hukum perdata, pada pokoknya hukum ini mengenal dua cara penarikan yaitu penarikan kembali secara tegas dan penarikan kembali secara diam-diam

a. Penarikan Kembali Secara Tegas

Penarikan kembali hibah wasiat secara tegas, diatur di dalam pasal 992 dan 993 KUH Perdata. Pasal 992 berbunyi : “Dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 934, tiap-tiap wasiat baik seluruhnya maupun untuk sebagian, tak boleh dicabut kembali melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian atau dengan akta notaries yang harus, dengan mana si yang memberi wasiat menyatakan kehendaknya akan mencabut wasitu itu atau untuk sebagian”.⁴⁴ Berdasarkan pasal tersebut penarikan kembali hibah wasiat dilakukan oleh penghibah pada waktu masih hidup dan penghibah membuat suatu akta yang khusus yang tujuannya untuk mencabut niat yang baik itu. Menurut Oemar Salim, penarikan kembali hibah wasiat secara tegas ini menurut pasal 922 dapat dilakukan : (1) Dalam suatu hibah wasiat baru, yang diadakan menurut pasal-pasal BW, (2) Dalam suatu notaries khusus⁴⁵. Pengertian khusus dalam arti sempit mengandung maksud, bahwa suatu hibah wasiat dapat ditarik kembali dengan notaris biasa, yang hanya memuat penarikan yang dikehendaki. Akan tetapi pengertian khusus juga dapat diartikan luas, yaitu suatu statement dapat ditarik kembali dengan akta notaris biasa, yang tidak hanya penarikan kembali saja. melainkan dapat pula memuat penetapan - penetapan lain mengenai kemauan terakhir dari si peninggal warisan⁴⁶ Pasal 933 KUH Perdata yang menunjuk kepada suatu kemungkinan, bahwa suatu pernyataan tidak hanya memuat suatu penarikan kembali, tetapi mengulangi beberapa penetapan dalam testament lama, ketentuan – ketentuan yang diulang tetap dipergunakan.⁴⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pada umumnya suatu hibah wasiat, baik dilingkungan hukum adat Islam maupun BW dapat ditarik kembali oleh penghibah, ini sesuai dengan sifat hibah selaku kemauan terakhir.⁴⁸ Pada pokoknya hukum perdata membolehkan menarik kembali hibah wasiat yang sudah dikrarkan, karena hibah wasiat itu bermula dari suatu pihak, jika pihak yang berhibah wasiat itu menarik kembali niatnya, itu hal yang wajar dan diperbolehkan. Jadi penarikan kembali disini sama dengan menggugurkan atau membatalkan niat baiknya.

Dengan perkataan lain hibah wasiat sudah diniatkan diberikan kepada orang lain, namun ditarik kembali. Hibah wasiat atau legaat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barang dari jenis tertentu seperti : (1) segala barang yang bergerak, (2) atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh sebagian harta peninggalan.⁴⁹ Penetapan wasiat khusus, mengandung maksud bahwa si penghibah sudah menentukan jenis barang-barang yang akan dihibahwasiatkan kepada orang lain, apakah barang itu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam pasal 875 BW berbunyi : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 217

⁴⁵ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta, Renika Cipta, 1991) hal 131

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 217

⁴⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum* hal 132

⁴⁹ Idris Ramulyo M, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Islam, 1992), hal 135

dikehendaknya akan terjadi setelah meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali”⁵⁰

Berdasarkan pasal 875 BW dan pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan kembali harta yang akan diberikan kepada orang lain, selama penghibah belum meninggal dunia adalah boleh. Bertitik tolak dari pasal 875 BW, maka penghibah sebagai pihak yang berwasiat menyerahkan sebagian hartanya yang sudah ditentukan, namun ditarik kembali itu adalah hal yang wajar sebab hal itu merupakan hak miliknya secara utuh.

b. Penarikan Kembali Secara Diam-diam

Penarikan kembali hibah wasiat secara diam-diam dapat diketahui dari tingkah perbuatan si penghibah, manakala sesudah hibah wasiat itu dimuat. Dalam kondisi yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa si penghibah berkeinginan menarik kembali apa yang pernah diucapkan. Tindakan penghibah untuk menarik kembali secara diam-diam ini tidak begitu tampak karena disitu sisi si penghibah telah berniat untuk menghibahkan, sedang disisi lain berniat menggugurkan.

Subekti mengatakan wasiat itu testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal. Pada prinsipnya pernyataan yang demikian keluar dari satu pihak dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya⁵¹ Di dalam BW ada tiga perumpaan penarikan kembali testament dengan jalan diam-diam : (1) Kemungkinan seseorang yang meninggalkan warisan berturut-turut membuat testamen, di mana satu dengan yang lain berbeda. Misalnya si pemberi wasiat memberikan sebuah rumah kepada A, sedangkan pada testamen lainnya memberikan rumah kepada B. Masalah dalam hal ini wajib diteliti lebih lanjut apa maksud sebenarnya dari sipeninggal warisan tersebut. (2) dikatakan oleh pasal 996, jika suatu barang dalam satu testament telah dihibahkan pada seseorang. Selanjutnya barang tersebut dijual atau ditukarkan pada orang lain oleh si penggugat sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, maka penghibah pada yang pertama dinyatakan dicabut kembali. (3) Pasal 934 BW, mengatakan bahwa suatu testamen olografis dicabut kembali dari notaries oleh orang yang membuat testamen itu, maka testament itu dinyatakan dicabut kembali.⁵²

Ketiga perumpamaan tersebut dapat dipahami bahwa penghibah dalam membuat pernyataan untuk memberikan hartanya masih ragu-ragu untuk melepas niat baiknya

3. Akibat Hukum Menarik Kembali Hibah Wasiat

Harta benda merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan manusia, karena itu pemanfaat harta benda termasuk cara pemindahannya harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan serius yaitu kegoncangan dan permusuhan. Diantara cara peindahan hak milik seseorang kepada orang lain adalah dengan melalui hibah wasiat. Cara pemindahan semacam ini merupakan sistem yang telah diakui dan diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam Hukum Perdata, Pemindahan hak milik melali hibah wasiat dilakukan bilama si penghibah meninggal dunia. Disini akan terlihat serah terima dari pemberi itu. Jika pemindahan terjadi secara langsung pada waktu penghibah dan penerima masih hidup, maka keadaan itu terjadi akibat hukum hibah itu. Sebaliknya jika penghibah memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi penyerahan barang yang ditentukan itu

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 194

⁵¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita* Hal 106

⁵² *Ibid*

setelah si penghibah meninggal dunia, maka keadaan ini terjadi perbuatan hukum yaitu wasiat.

Keadaan itu akan berubah, manakala yang berwasiat merubah keinginannya, yaitu menarik kembali pemberiannya itu disini akan terjadi konflik antara pemberi dengan penerima walaupun harta benda yang akan diberikan belum sampai ke tangan penerima. Kekecewaan akan terus berlangsung jika pihak pemberi tidak memberikan keputusan kepada pihak penerima, tentang sebab-sebab menarik kembali niat baiknya. Untuk menjaga kericuhan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka harus diketahui ketetapan bagasan wasiat yaitu : (1) wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan, (2) wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki pihak yang berwasiat. (3) wasiat yang melebihi sepertiga dapat merugikan ahli waris. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun hibah wasiat maka penghibah akan memberikannya. Namun karena perubahan yang disebabkan oleh ulah pemberi, maka kepastian tidak terjadi.

Dengan demikian hibah wasiat yang dilakukan seseorang kepada orang lain jelas dapat menimbulkan akibat hukum. Terlebih lagi jika perbuatan yang baik itu ditarik kembali oleh pemberi, maka pihak penerima kecewa dan dapat menimbulkan kegoncangan dan kepincangan sosial dalam masyarakat.

C. Penutup

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat dengan nama yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barang dari jenis tertentu. Hibah wasiat dapat digugurkan atau dibatalkan sehingga tidak mengikat lagi. Hal ini dapat dikatakan hibah wasiat itu dapat ditarik kembali.

Dalam masalah penarikan kembali hibah wasiat dalam hukum perdata dan hukum Islam disebabkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam Indonesia ayat 1, 2 dan 3

2. Ketentuan-ketentuan hibah wasiat dalam hukum Islam adalah seseorang boleh menyerahkan harta miliknya pada orang lain, penyerahan tersebut tidak boleh melebihi kadar yang telah ditentukan yaitu 1/3 harta warisan, untuk dapat dikatakan sah suatu pemberian pada orang lain maka harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun dalam akad tersebut. Dalam hal ini diatur dalam pasal 913 s/d 929 BW.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Baharuddin dan Yanti, Ily, (2015) *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Al-Asqalani. Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar, (1983) *Bulughul Maram*, Terj. Muh. Syarief Sukandy, Bandung, Al-Ma'arif,

Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariya, (1974) *Al-Muwatha Malik*, (Bairut, Dar Fikr,

As-Shan'ani, (1995) *Subulussalam*, Terj. Abu Bakar Muhammad Surabaya, Al Ikhlas,

- As-Syafi'i, (ttg) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, Surabaya, Al-Hidayah,
- Azikin, Wahyu, (2018) *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Meraja Journal* Vol. 1, No. 3, November
- Azni, (2018) *Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, **An Nida'** :Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 Juli - Agustus
- Depertemen Agama RI, (tt) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam,
- Projodikoro, Wiryono, (1986) *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung Bale Bandung,
- Rahman, Fatchur, (1994) *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif,
- Ramulyo M, Idris, (1992) *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Islam
- Risdalina, (2018) *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan*, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 06. No. 02 September.
- Sabiq, Syayid, (1988) *Fiqhus Sunnah* Bandung, Al-Ma'arif,
- Salim, Oemar, (1991) *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* Jakarta, Renika Cipta,
- Sanjaya, Umar Haris, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 67-97
- Shomat, Abd. (2010) *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kencana,
- Soe'yb, Joesoef, (1983) *Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Wijaya
- Subekti dan Tjitrosudibio, (1992) *Kita Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta, Pradnya paramita,
- Tim laskar Pelangi, (2013) *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* Kediri, Lirboyo Press